

Catatan Jurnal Perempuan

Oligarki

If you say, I'm for equal pay, that's a reform. But if you say, I'm a feminist, that's a transformation of society(Gloria Steinem). “

Seorang perempuan mengantri mendaftar untuk memperoleh dana bantuan korban konflik Aceh. Petugas kecamatan menolaknya. Dalam pandangan sang birokrat desa, korban konflik haruslah laki-laki.

Perempuan tadi adalah korban perkosaan di masa konflik Aceh. Ia hanya dianggap “korban kecil” oleh pak Camat. Cerita ini diperoleh Zubaidah Djohar ketika meneliti belantara korupsi dan kehidupan perempuan di Aceh. Lalu, kita membaca laporan ICW: “Aceh adalah Peringkat Empat Korupsi Nasional”.

Patriarkisme menumbuhkan hirarki kuasa, dan hirarki itu menghasilkan diskriminasi. Tetapi Korupsi membuat diskriminasi itu menjadi penderitaan: hak perempuan untuk memperoleh keadilan dirampas oleh birokrasi yang korup. Trauma kekerasan seksual berlanjut, dan harapan terhadap kesejahteraan di masa depan pudar. Koruptor bukan saja mencuri uang negara, tetapi juga merampok masa depan perempuan.

Dalam pola itu ada relasi sebab akibat antara korupsi dan penderitaan perempuan. Misalnya, bila antibiotik tidak tersedia di sebuah puskesmas kabupaten, sebabnya sederhana: sang bupati lebih menganggarkan bahan bakar Harley Davidson-nya pada APBD. Hobi mewah pejabat berbanding langsung dengan angka kematian ibu dan anak.

Perspektif adalah penentu arah anggaran. Bila dana pendidikan pemerintah pusat hanya diendapkan di Bank Pembangunan Daerah, maka ketimpangan pengetahuan akan dirasakan paling buruk pada kelompok perempuan. Pejabat tanpa perspektif keadilan gender, juga harus disebut sebagai koruptor peradaban.

Sekali lagi, korupsi bukan sekedar delik pidana, tetapi menyangkut pola pikir patriarkis: kamar mandi ruang kerja bupati yang direnovasi

dengan anggaran 100 juta rupiah, pasti menunda pembangunan toilet sehat di pasar-pasar tradisional yang penjual dan pembelinya mayoritas perempuan.

Persekongkolan antara birokrasi lokal, partai politik dan bisnis kotor, membuat korupsi menjadi konstitusi yang sesungguhnya. Ia mengatur Pemilu, ia menentukan produk legislatif, ia menguasai opini publik. Korupsi tumbuh dalam kekuasaan, berbiak melalui politik, bahkan pola-pola yang sama juga tumbuh di universitas.

Feminisme adalah sinonim dari perjuangan keadilan. Pada tubuh perempuanlah seluruh diskriminasi peradaban berlangsung: ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, seksualitas. Dan korupsi makin memperburuk kedudukan marginal perempuan.

Karena itu, pemberantasan korupsi adalah kepentingan politik perempuan, justeru karena ia adalah korban utama. Kepekaan moral, rasa keadilan, *ethics of care*, dapat diajukan sebagai keunggulan natural perempuan, suatu dasar antropologi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Tetapi lebih dari itu, pemberantasan korupsi adalah upaya politik besar untuk meruntuhkan jaringan oligarki bisnis-politik, gurita patriarki yang makin melilit republik. Kebutuhan itu amat kita perlukan hari-hari ini, bukan sekedar demi kesetaraan hak atas kesejahteraan, tetapi demi -dalam kalimat tajam Gloria Steinem- "a transformation of society".

(RG)